

KONFLIK HORIZONTAL WARISAN BUDAYA, MEGALITIK SITUS GUNUNG PADANG

Bambang Sulistyanto

*Pusat Arkeologi Nasional, Jl. Condet Pejaten No. 4, Jakarta Selatan 12510
bsoelistyo@yahoo.com*

Abstrak. Konflik warisan budaya Situs Gunung Padang merupakan isu baru yang muncul pada 2012, akibat perbedaan dalam memaknai warisan budaya. Bagi kalangan arkeologi, Gunung Padang hanyalah situs megalitik “biasa” yang dikenal dengan istilah punden berundak. Tetapi bagi Tim Terpadu Riset Mandiri, Situs Gunung Padang adalah piramida dan diduga berusia jauh lebih tua dari Piramida Mesir. Konflik horizontal Gunung Padang adalah konflik perbedaan paradigma arkeologi yang berdampak pada perbedaan pandangan dalam menafsirkan keberadaan tinggalan budaya. Konflik tersebut, merupakan konflik murni yang terbatas pada ranah kepentingan Ilmu Pengetahuan tanpa ada intervensi oleh berbagai faktor, termasuk faktor politis. Disisi lain arkeologi sudah lama menjadi ajang pergulatan pemikiran para ahli. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kajian pokok arkeologi bersifat *post-facto* yang terjadi tidak sekarang, tetapi ratusan bahkan ribuan atau jutaan tahun silam. Pada sisi lain, namanya pengetahuan itu sebenarnya bersifat relatif dan subyektif, karena telah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Oleh karena itu, pengetahuan yang benar atau realitas masa lampau itu tidak ada, yang ada hanyalah pengetahuan masa lampau versi masyarakat masa kini. Perdebatan dalam ranah ilmu pengetahuan merupakan hal yang biasa. Jika konflik Gunung Padang dapat diselesaikan dengan benar, justru akan memberikan manfaat, salah satunya mendorong ke arah perubahan yang lebih baik.

Kata kunci: Gunung Padang, Megalitik, Konflik, Perbedaan, Pemaknaan.

Abstract. Horizontal Conflict Regarding A Cultural Heritage: The Megalithic Site of Gunung Padang. Conflict about a cultural heritage, Gunung Padang Site, is a new issue that surfaced in 2012 due to different views in interpreting a cultural heritage. To archaeologists, Gunung Padang is a “typical” megalithic site, which is known as terraced structure. However, to Tim Terpadu Riset Mandiri (Integrated Team of Independent Research), it was a pyramid much older than the ones in Egypt. The horizontal conflict about Gunung Padang is a conflict caused by different archaeological paradigms, which impacted on different views in interpreting the existence of cultural remains. It is a purely conflict, which scope is limited to the domain of Academic purposes with no interventions from various factors, including political factor. Archaeology has long been an arena of debates by experts. One of the reasons is because the main study of archaeology is *post-facto* – does not happen in recent time, but hundreds and even thousands and millions of years ago. On the other hand, knowledge/science is relative and subjective in nature because it is influenced by various interests. Therefore there is no true knowledge/science or reality of the past. What exists is knowledge about the past according to present-day people. Debates in knowledge/science domain are natural. In fact, if the conflict about Gunung Padang can be resolved in the right way, it will be a benefit, among others it will lead to a change for the better.

Keywords: Gunung Padang, Megalithic, Conflict, Difference, Interpretation.

1. Pendahuluan

Dimensi kultural yang mengkaji secara ilmiah masalah interaksi antara warisan budaya dengan masyarakat dan sebaliknya interaksi antara masyarakat dengan warisan budaya, masih sangat jarang dilakukan. Guna mengatasi kekosongan tersebut, penelitian yang mengungkapkan konflik pemanfaatan warisan budaya Situs Gunung Padang ini dipandang penting dan bahkan dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan.

Terletak di atas bukit yang rawan longsor, Situs Megalitik Gunung Padang tiba-tiba namanya menjadi terkenal dan banyak diperbincangkan orang. Apalagi setelah dikunjungi Presiden beserta rombongan pada 27 Februari 2014, situs megalitik terbesar di Asia Tenggara ini, semakin sombong menantang dunia untuk mengkajinya. Padahal situs yang terselip di Dusun Karyamukti, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini, 3 tahun yang lalu nampak sepi, hanya didatangi oleh kalangan terbatas peneliti dan pelestari arkeologi. Pada hari-hari biasa situs ini setiap bulan rata-rata hanya dikunjungi 500-an orang, tetapi sekarang, sejak situs ini menjadi perbincangan umum, dan debat panjang para ahli, situs ini tercatat dikunjungi tidak kurang dari 9.000 pengunjung perbulan, bahkan pada Juli 2012 yang lalu mencapai 16.000 pengunjung (Tim Peneliti Gunung Padang 2012: 15).

Situs Megalitik Gunung Padang sungguh fenomenal. Bagi kalangan arkeologi, Gunung Padang hanyalah situs megalitik “biasa” yang dikenal dengan istilah punden berundak. Keberadaan situs seperti ini, dapat dijumpai di banyak tempat seperti di Kuningan, Garut atau Situs Ciampea, Bogor. Para ahli arkeologi beranggapan, Gunung Padang merupakan produk budaya megalitik yang berkembang pada sekitar 2.500 – 1.500 SM, sebagai tempat pemujaan roh leluhur. Pada saat sebagian peneliti arkeologi sibuk mengkaji makna warisan budaya Situs Gunung Padang, tiba-tiba muncul berita

yang menggemparkan dari berbagai media massa, seperti di kutip oleh Ali Akbar. Gunung Padang adalah bangunan piramida yang luasnya sepuluh kali lebih besar dari Candi Borobudur. Katanya, bangunan prasejarah ini hanya akan mampu dibangun oleh empat peradaban yang berbeda. Di bawah tanah situs ini, tersembunyi harta karun. Lebih spektakuler lagi, katanya lagi bangunan piramida itu berusia jauh lebih tua dari Piramida Mesir (Akbar 2013: 23).

Pandangan di atas, spontan membuat tertawa para ahli khususnya kalangan arkeologi. Walaupun demikian tidak sedikit pula orang percaya, karena yang mengutip pendapat tadi adalah orang arkeologi juga. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian besar arkeolog hanya bisa menggeleng-geleng. Masyarakat awam pasti dipusingkan pula, karena informasi yang diterima berbeda dengan informasi yang didengar selama ini. Situs Gunung Padang itu wakil dari kebudayaan mana? Makna warisan budaya yang seringkali dikatakan sebagai media peneguhan jatidiri dan pemersatu bangsa (MacLeod 1977; Clerre 1989; Grady 1977), ternyata nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat ditafsirkan secara berbeda. Dengan perkataan lain, warisan budaya dapat dipersepsikan sesuai dengan kecenderungan orientasinya. Jika kebetulan persepsi itu memiliki nuansa bobot kognitif misalnya, maka warisan budaya akan dipersepsikan sebagai ‘informasi’ yang mampu menambah dan memperkaya khazanah kognitif yang sudah dimiliki oleh masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika persepsi mengarah pada ekspresivitas, dengan persepsi afektif, maka terdapat kemungkinan warisan budaya cenderung dibesar-besarkan dalam arti dan maknanya (Nimpoena 1980:29).

Dalam era reformasi sekarang ini, masyarakat telah mengalami pencerdasan yang luar biasa. Mereka lebih bersikap proaktif dan bahkan agresif dalam berpendapat dan mengapresiasi warisan budaya di

sekililingnya. Masyarakat tidak lagi bersikap pasif menunggu inisiatif pemerintah seperti yang terjadi pada masa orde baru, tetapi mereka nampak lebih berani menuntut hak-haknya sebagai pewaris yang sah terhadap warisan budaya di sekitarnya. Fenomena kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat, dan berperan aktif dalam pengelolaan warisan budaya, di satu sisi sangat positif, karena membantu program pemerintah dalam upaya pelestarian. Pada sisi lain, sikap proaktif yang berlebihan justru dapat membahayakan, karena makna warisan budaya dapat saja ditafsirkan sesuai dengan kecenderungan orientasi kepentingannya. Perbedaan persepsi dalam memaknai warisan budaya inilah, menjadi salah satu faktor penyebab sekaligus pemicu konflik kepentingan yang akhir-akhir ini sering terjadi di berbagai tempat, khususnya di situs-situs yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas (Sulistyanto 2006: 581).

Banyak faktor penyebab munculnya konflik pengelolaan warisan budaya, baik karena perbedaan persepsi, atau perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan. Pada prinsipnya konflik akan terjadi kalau kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Konflik dapat pula muncul sebagai akibat dari kesalahpahaman budaya atau karena perbedaan politik. Konflik juga dapat terjadi jika hubungan masyarakat tidak harmonis yang disebabkan oleh ketidakpercayaan atau permusuhan. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, konflik seringkali muncul di antara kedua belah pihak atau lebih yang pada dasarnya memiliki sasaran dan tujuan yang sama, tetapi berbeda dalam cara pencapaiannya (Sulistyanto 2006). Berbagai faktor penyebab konflik sangatlah kompleks, tetapi pada hakekatnya, permasalahan utama terletak pada perbedaan dalam memaknai obyek, warisan budaya.

Faktor penyebab konflik tersebut tidak dapat dilihat secara sepihak, karena dilatarbelakangi oleh sejarah sistem



Foto 1. Warisan Budaya Situs Gunung Padang.

pengelolaan warisan budaya dan beberapa faktor perubahan sosial budaya dan politik yang sangat rumit dan cepat berkembang, sehingga solusi pemecahannya pun diperlukan kebijakan ekstra yang tidak mudah. Demikian pula, faktor penyebab konflik yang terjadi di berbagai tempat tidak lah sama, tetapi secara substantif memiliki kerangka dasar yang tidak jauh berbeda, sehingga dalam penanganannya diperlukan strategi resolusi konflik¹ yang sesuai dengan akar permasalahan pada masing-masing daerah tersebut.

Tulisan ini tidak membahas masalah resolusi konflik yang memiliki dimensi sangat luas, melainkan hanya mengkaji bagaimana konflik horizontal Situs Gunung Padang dapat terjadi dan apa faktor-faktor penyebabnya (Foto 1). Tulisan ini, juga terbatas pada kajian konflik murni, dalam arti konflik karena perbedaan pandangan, terlepas adanya kemungkinan munculnya kepentingan eksternal (politis) di luar kepentingan arkeologi sebagai disiplin ilmu. Dalam konteks demikian itulah, artikel ini tidak dimaksudkan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi hanya memperlihatkan, bahwa ada pendapat lain

¹ Resolusi konflik yang dimaksudkan di sini pada hakekatnya adalah proses penyelesaian konflik dengan cara menangani akar permasalahan yang menjadi sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat tahan lama di antara berbagai pihak yang berkonflik. Dengan demikian yang menjadi sasaran bukan hanya kesepakatan untuk mengakhiri “perselisihan”, tetapi lebih menekankan pada pencapaian suatu resolusi dari berbagai perbedaan yang menjadi penyebabnya. Lebih jauh lihat Simon Fisher (2002).

yang tidak kalah penting di samping pendapat arkeolog yang perlu kita dengarkan. Alasan saya memandang penting permasalahan tersebut mendesak untuk segera disikapi, karena fakta sosial memperlihatkan, bahwa konflik kepentingan seringkali mewarnai upaya pemerintah dalam melakukan pelestarian warisan budaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam berkenaan dengan objek penelitian yang bersifat eksploratif (Kleden 1998: 23). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diungkapkan berbagai faktor penyebab terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya arkeologi Situs Gunung Padang. Dipilihnya Situs Gunung Padang sebagai obyek penelitian dengan alasan, bahwa situs ini sangat terkenal dan menjadi wacana publik akibat konflik terbuka yang hingga sekarang belum ditemukan solusinya.

Penelitian ini, di samping mempelajari data sekunder, dilakukan pula penelusuran data primer yang dicari di lapangan melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*). Mempertimbangkan objek kajian ini adalah fakta sosial budaya yang sudah dan sedang berlangsung, maka pengamatan terlibat (*observation participant*), dirasakan lebih tepat untuk menjaring data yang diperlukan. Teknik observasi ini berupaya sebanyak mungkin bertemu dan berbicara dengan banyak orang yang berkepentingan terhadap Situs Gunung Padang². Hasil dari observasi lapangan, dipertajam melalui wawancara mendalam yang dilakukan terhadap *stakeholders*, seperti kalangan akademik, kalangan pemerintah, Lembaga Profesi, Tim

2 Alasan digunakannya metode ini, karena peneliti tidak akan dapat memahami proses berpikir penduduk setempat, jika hanya melakukan pengamatan proses interaksi secara selintas. Observasi dilakukan guna menangkap secara langsung fenomena-fenomena sosial-budaya masyarakat yang berkaitan dengan konflik warisan budaya Gunung Padang.

Terpadu Riset Madiri, LSM maupun masyarakat di sekitar situs dengan bobot pertanyaan yang berbeda-beda³.

Ketepatan dalam pemilihan informan, disadari merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan dalam penelitian ini. Informan yang digunakan, adalah mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konflik Situs Gunung Padang. Dalam hal ini mereka adalah *stakeholders* dan sebagian penduduk yang berkepentingan memanfaatkan sumber daya arkeologi Situs Gunung Padang. Memperhitungkan konflik situs ini melibatkan banyak pihak, maka penelitian dilengkapi pula dengan beberapa informan kunci⁴. Adapun Pengumpulan data dilengkapi dengan diskusi kelompok terfokus, dengan cara menghadiri seminar dan diskusi yang pada waktu itu cukup sering diselenggarakan oleh berbagai lembaga formal maupun non formal dalam konteks memaknai Situs Gunung Padang.

2. Pengertian dan Makna Konflik

Banyak ilmuwan mendefinisikan fenomena konflik secara berbeda-beda, tergantung dari kacamata pandang masing-masing (Luthans 1985: 386; Robbins 1996: 428). Stoner dan Freeman (1989: 391) misalnya, mendefinisikan konflik sebagai ketidaksepakatan antar individu atau kelompok yang berawal dari kebutuhan berbagai sumber daya yang terbatas atau perbedaan status, tujuan dan sasaran, serta

3 Sebagian besar informan sudah dikenal penulis, maka mekanisme wawancara tidak terlalu formal bahkan terlihat akrab seperti pembicaraan biasa. Diskusi sering kali dilakukan baik di lapangan maupun di tempat resmi, baik dengan rekan-rekan Arkenas maupun dengan Tim Terpadu Riset Madiri, tetapi sebagian besar dari mereka mungkin tidak sadar kalau sedang diwawancarai.

4 Mereka adalah unsur-unsur kepemimpinan formal dan informal. Kategori kepemimpinan formal dalam penelitian ini adalah dari bupati hingga camat dan kepala desa setempat serta pimpinan-pimpinan instansi pengelola Benda Cagar Budaya kawasan Situs Gunung Padang baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Kategori tokoh informal, ialah *sesepuh* desa dan tokoh masyarakat setempat yang dipandang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang permasalahan. Tokoh informal seperti ini akan dijadikan informan kunci, sekaligus sebagai saksi hidup yang diharapkan mampu memberikan data berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

perbedaan budaya. Sejalan dengan pandangan tersebut Kreitner dan Kinicki (1995: 283), menegaskan konflik adalah segala jenis oposisi (pertentangan) atau interaksi yang bersifat antagonis dan sering menjadi prasyarat yang diperlukan untuk perubahan.

Definisi tersebut memperlihatkan, bahwa konflik memiliki dimensi sangat luas, tidak terbatas pada pertentangan masalah materi, tetapi juga menyangkut nilai maupun perbedaan budaya. Beberapa perbedaan definisi di atas, terlihat jelas ada suatu kesepakatan, bahwa konflik ditandai oleh ketidakcocokan atau perbedaan pandangan, tujuan, individu atau kelompok dalam memperebutkan objek yang sama demi terwujudnya kepentingan yang berbeda (Abdurachman 2004: 34). Perbedaan pandangan dalam menafsirkan eksistensi warisan budaya Situs Gunung Padang inilah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik.

Berangkat dari pandangan di atas, konflik dalam tulisan ini diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan. Kepentingan itu sendiri adalah perasaan orang atau kelompok mengenai apa sesungguhnya yang mereka inginkan. Perasaan tersebut cenderung bersifat sentralistik dalam pikiran dan mempengaruhi tindakan yang akan membentuk sikap, tujuan dan niatnya (Raven dan Rubin 1983). Dalam konteks kajian Situs Gunung Padang, konflik secara kongkrit dimaknai sebagai hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki perbedaan persepsi dalam memaknai warisan budaya.

Dengan pendefinisian tersebut, kita dapat memprediksi apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok yang sedang bertikai, karena biasanya persepsi memiliki dampak yang bersifat segera diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku (Dean *et al.* 2004: 27). Di samping itu, pendefinisian konflik dalam pengertian yang bersifat perseptual ini, berarti membuka kemungkinan bahwa salah satu pihak merasakan adanya konflik kepentingan, sementara pihak

lainnya mungkin tidak menyadari apa yang dilakukan adalah menjadi faktor penyebab konflik. Namun demikian, kedua pihak atau lebih tersebut mungkin akan tetap bertindak sesuai dengan persepsi yang diyakininya, karena masing-masing merasa pihaknya yang paling benar.

Kecenderungan konflik sebagai proses interaksi sosial, Stonner dan Freeman secara umum membedakan peran konflik dalam kehidupan masyarakat menjadi dua macam, yakni pandangan lama (*old view*) dan pandangan kini (*current view*). Pandangan lama menyatakan, bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dalam pandangan ini merupakan fenomena yang negatif, merugikan, karena itu harus dihindari atau dihilangkan. Guna memperkuat konotasi negatif ini, konflik disinonimkan dengan istilah *violence*, *destruction*, dan *irrationality*. Konflik dilihat sebagai suatu hasil disfungsi akibat komunikasi yang buruk, kurangnya kepercayaan dan keterbukaan. Sementara itu pandangan modern, menyatakan konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konflik tidak dapat dihindari selama manusia menggantungkan hidupnya dari kehidupan orang lain. Oleh karena itu konflik perlu diterima bahkan dipertahankan pada tingkat minimum serta dirasionalisasikan agar memiliki manfaat (Stoner dan Freeman 1989: 392).

Dalam pandangan ilmu sosial memang terdapat sejumlah teori konflik yang saling bertentangan. Teori yang dikembangkan oleh Levis Coser misalnya, sangat menentang pandangan para ahli sosial yang melihat konflik hanya dari kaca mata negatif saja. Menurutnya, konflik memiliki sifat fungsional bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Konflik memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial sekaligus mewujudkan perubahan sosial sesuai yang diharapkan (Cosser 1994). Jika konflik mampu diatasi secara bijak, maka akan menghasilkan suatu konsensus baru

terhadap berbagai hal yang menjadi sumber munculnya perbedaan pendapat. Bahkan konflik fungsional ini bukan tidak mungkin akan menghasilkan perubahan-perubahan yang bermuara pada perbaikan bersama. Dalam pandangan ini konflik justru perlu ‘dintensifkan’, artinya dimunculkan bukan disembunyikan untuk mencegah munculnya masalah-masalah baru yang lebih berbahaya di masa depan. Sebaliknya, jika konflik menghasilkan perubahan yang mengarah pada keburukan maka konflik disfungsi ini diperlukan pengelolaan serius untuk dihilangkan.

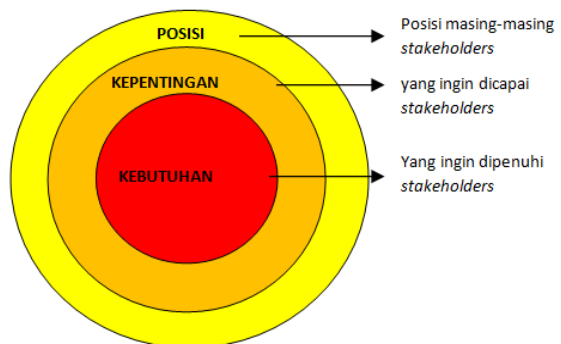
Pemahaman penting yang harus kita sadari bersama adalah, konflik merupakan realitas kehidupan yang wajar dan tidak dapat dihindarkan. Selama manusia hidup dan saling berinteraksi, konflik akan selalu terjadi baik konflik interpersonal maupun konflik antar kelompok (Nugroho *et al.* 2004: xxii). Konflik akan selalu terjadi jika tujuan masyarakat tidak sejalan, karena berbagai perbedaan persepsi. Sebaliknya konflik tidak harus dikonotasikan sebagai fenomena yang negatif, sebab mungkin saja konflik akan menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahan. Dalam kehidupan masyarakat demokratis sekarang ini, konflik justru diperlukan, tetapi untuk dihadapi bukan dihindari. Jika konflik dapat diselesaikan dengan cara damai penuh kesadaran, maka justru kita dapat memperoleh manfaat dari konflik, yaitu salah satunya mendorong ke arah perubahan yang diperlukan (Fisher *et al.* 2002: 6). Hubungan antara konflik dengan perubahan cenderung merupakan suatu proses yang berlangsung secara otomatis dan terus-menerus, karena perubahan dapat menimbulkan konflik, sebaliknya konflik menyebabkan perubahan (Lauer 1993: 290).

3. Pemetaan Konflik Situs Gunung Padang

3.1 Identifikasi Pihak-pihak yang Berkonflik

Warisan budaya Situs Gunung Padang, memiliki publik yang jamak, dalam arti banyak pihak berkepentingan yang masing-masing

mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jika kebutuhan dasar dari berbagai pihak tersebut tidak terpenuhi, maka konflik dapat terjadi. Dengan demikian yang penting dilakukan adalah mengidentifikasi subjek dari berbagai pihak (*stakeholders*) dan memahami apa kebutuhan masing-masing yang diharapkan dari Situs Gunung Padang. Salah satu alat bantu menganalisis identifikasi kebutuhan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan Situs Gunung Padang tersebut, adalah analisis bawang bombay, sebagaimana disarankan oleh Fisher *et al.* (2000: 17-27).



Gambar 1. Analisis Model Bawang.

Cara kerja alat bantu untuk menganalisis konflik ini menggunakan analogi gambar bawang Bombay yang terdiri atas tiga lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah dan lapisan dalam (Gambar 1). Ketiga lapisan tersebut dipergunakan sebagai media penjelasan untuk mengetahui perbedaan maupun persamaan kepentingan dan kebutuhan antara berbagai pihak. Lapisan luar merupakan posisi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan Situs Gunung Padang secara permukaan dapat dilihat oleh semua orang. Lapisan kedua dianalogikan sebagai kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing *stakeholders* sesuai dengan posisinya. Lapisan ketiga adalah merupakan kebutuhan dasar dari *stakeholders* yang ingin mereka penuhi (untuk mewujudkan kepentingan). Dengan demikian, analisis model bawang ini merupakan strategi awal untuk menganalisis perbedaan pandangan tentang konflik kepentingan sumber daya

Tabel 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Pemanfaatan Warisan Budaya Situs Gunung Padang.

No.	PIHAK	POSISI	KEPENTINGAN	KEBUTUHAN
1	Pelestari: • Ditjen Kebudayaan • Direktorat Pelestarian Cagar Budaya • BP 3	Pengelola situs, melarang berbagai pemanfaatan di luar tujuan pelestarian	Keleluasaan mengelola situs untuk tujuan pelestarian dan pemanfaatan	Terciptanya lahan situs yang terlindungi dari berbagai ancaman dan kerusakan
2	Peneliti: • Puslit Arkenas • Balai Arkeologi	Peneliti, penafsir, kebudayaan masa lalu	Pengembangan ilmu pengetahuan	Kebenaran Ilmu pengetahuan dan lahan situs yang terjaga kelestariannya
3	Akademisi: Perguruan Tinggi	Peneliti, Pengkaji, penafsir dan interpreter	Pengembangan ilmu pengetahuan	Kepuasan intelektual
4	Lembaga Profesi (Ikatan Ahli Arkeologi)	Pengamat dan melakukan kontrol sosial	Pengembangan ilmu pengetahuan	Kepuasan intelektual dan pengembangan ilmu pengetahuan
5	Tim Terpadu Riset Mandiri	Pengamat dan peneliti	Pengembangan ilmu pengetahuan	Kepuasan intelektual dan pengembangan ilmu pengetahuan
6	Pusat Survei Geologi	Pengamat dan peneliti Geologi	Pengembangan ilmu pengetahuan	Kepuasan intelektual dan pengembangan ilmu pengetahuan
7	Pemprov: • Pem Prov Jawa Barat • Dipar Prov. Jawa Barat • Diparda Kab. Cianjur	Pengelola sumber daya daerah untuk kepentingan Kepariwisata	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Kelestarian Situs dan keuntungan materi
8	Wisatawan	Pencari hiburan, rekreasi, bersenang-senang untuk kepuasan batin	Mendapatkan informasi pengetahuan baru dan layanan yang memuaskan	Ruang dan objek wisata yang dapat memberikan kepuasan batin
9	Penduduk Gunung Padang secara umum	Pemilik dan pemanfaat lahan untuk berbagai kepentingan	Keleluasaan memanfaatkan lahan untuk berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari	Lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
10	LSM, Forum Peduli Situs Gunung Padang	Monitoring	Pengarahan Masyarakat	Pecinta sejarah kebudayaan
11	Wartawan	Kontrol Sosial Budaya	Keleluasaan mencari berita	Aktualisasi

arkeologi Situs Gunung Padang sebagaimana terlihat pada bagan di atas. Adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami berbagai kepentingan serta kebutuhan masing-masing *stakeholders*. Berikut hasil analisis konflik yang disajikan dalam bentuk matriks.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dari aspek posisi, nampak jelas berbagai pihak yang terlibat dalam pemanfaatan Situs Gunung Padang sangat beragam. Keberagaman posisi masing-masing *stakeholders*, akan mempengaruhi kepentingan yang ingin mereka capai sekaligus kebutuhan

dasar yang diinginkan. Posisi di kalangan arkeologi pelestari sebagaimana dalam tabel di atas, ditunjukkan oleh pihak Ditjen Kebudayaan dan jajaran di bawahnya (Direktorat Purbakala dan BP3) berbeda dengan posisi kelompok arkeologi peneliti sebagaimana ditunjukkan oleh Puslit Arkenas, dan Balai Akeologi.

Kepentingan Ditjen Kebudayaan dan jajaran di bawahnya adalah bersifat praktis, penyelamatan, sedangkan kepentingan Puslit Arkenas dan jajaran di bawahnya lebih bersifat akademis, penelitian. Kedua kepentingan yang berbedaini berdampak pada perbedaan kebutuhan, walaupun kedua lembaga itu dalam naungan yang sama yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebutuhan pihak pertama adalah terciptanya situs yang terlindungi dari berbagai ancaman dan kerusakan, sedangkan kebutuhan dasar pihak kedua adalah kepuasan intelektual atas penemuan-penemuan kebudayaan masa lalu. Kebutuhan terhadap penemuan-penemuan kebudayaan masa lalu tersebut, tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya pelestarian situs yang memadai untuk berbagai aktivitas penelitian sebagaimana menjadi pekerjaan pokok dari kalangan arkeologi peneliti. Dengan demikian pihak arkeologi peneliti, secara tidak langsung sebenarnya membutuhkan pula suatu kondisi Situs Gunung Padang yang terjaga kelestariannya dari berbagai ancaman kerusakan.

Jika dilihat secara sepintas table di atas, ke lima posisi kelompok *stakeholders* dari kalangan: 1). arkeologi peneliti, 2). Akademisi, 3). Lembaga Profesi, 4). Tim Terpadu Riset Mandiri, 5). Pusat Survei Geologi, memiliki persamaan kepentingan yakni pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun kebutuhan mereka sama pula yakni, kepuasan intelektual. Sementara dibawahnya, memperlihatkan perbedaan posisi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan jajaran di bawahnya (Dipar Prov. Jawa Barat dan Diparda dar Kab. Cianjur) dengan pihak wisatawan, Penduduk Gunung Padang, LSM dan wartawan. Perpedaan posisi

di atas mempengaruhi perbedaan kepentingan mereka. Kepentingan Pemprov Jabar dan jajaran di bawahnya adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dengan kebutuhan dasar mendapatkan keuntungan materi. Sementara kepentingan wisatawan ialah memperoleh informasi dan layanan yang memuaskan, dengan kebutuhan utama ruang dan objek wisata yang dapat memberikan kepuasan batin pengunjungnya. Kepentingan penduduk Gunung Padang, cenderung mencari keleluasaan dalam pemanfaatan lahan, karena kebutuhan mereka mencari nafkah ututuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun posisi LSM sebagai monitoring terhadap masyarakat, idealnya berkepentingan melakukan pengarahannya agar masyarakat lebih mencintai warisan budaya. Sementara itu, posisi wartawan sebagai kontrol sosial masyarakat, berkepentingan mencari berita dengan kebutuhan utama aktualisasi informasi.

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa walaupun terdapat perbedaan kepentingan, namun kebutuhan masing-masing *stakeholders* sebenarnya terikat oleh simpul yang sama, yaitu kebutuhan terhadap lahan beraktivitas. Kebutuhan lahan di wilayah Gunung Padang ini merupakan kebutuhan inti yang bagi mereka harus terpenuhi, sementara makna terhadap lahan itu sendiri masing-masing *stakeholders* berbeda dalam pemanfaatannya.

Kalangan arkeologi pelestari pada prinsipnya membutuhkan lahan situs untuk pelestarian. Kalangan arkeologi peneliti, akademisi, lembaga profesi, termasuk Tim Terpadu Riset Mandiri dan Pusat Survei Geologi, membutuhkan lahan untuk kepentingan akademik atau pengembangan Ilmu pengetahuan. Demikian pula Pemprov Jawa Barat beserta jajaran di bawahnya, membutuhkan lahan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Wisatawan, Penduduk Gunung Padang, LSM dan wartawan membutuhkan lahan untuk beraktivitas sesuai dengan profesinya masing-

masing yang berbeda. Penduduk Gunung Padang membutuhkan lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, bercocok tanam misalnya. LSM membutuhkan lahan untuk sosialisasi kepada masyarakat, dan wartawan membutuhkan lahan untuk aktualisasi berita. Perbedaan kebutuhan terhadap pemanfaatan lahan inilah yang pada akhirnya memunculkan konflik kepentingan. Situs Gunung Padang terbatas luasnya 291.800 meter persegi (Tim Peneliti 2012: 174), tetapi banyak pihak secara bersama-sama memanfaatkan dengan kepentingan yang berbeda-beda, maka dapat dipahami jika terjadi konflik yang hingga sekarang belum terselesaikan.

3.2 Pemetaan Konflik

Hasil identifikasi beberapa pihak yang terlibat dalam pemanfaatan Situs Gunung Padang menunjukkan, bahwa minimal ada duabelas pihak (*stakeholders*) sebagaimana terlihat pada table di atas. Dari duabelas pihak tersebut ternyata tidak semua terjadi konflik. Benturan kepentingan atau konflik hanya terdapat antara (1) Ditjen Kebudayaan (beserta jajaran di bawahnya) konflik dengan Tim Terpadu Riset Mandiri, (2) Puslit Arkenas konflik dengan Tim Terpadu Riset Mandiri, (3) pihak akademisi konflik dengan Tim Terpadu Riset Mandiri, (4) pihak Ikatan Ahli Arkeologi konflik dengan Tim Terpadu Riset Mandiri, (5) pihak Pelestari konflik dengan Tim Terpadu Riset Mandiri, (6) pihak Pusat Survei Geologi konflik dengan Tim Terpadu Riset Mandiri, dan (7) pihak Forum Peduli Gunung Padang konflik dengan Tim Terpadu Riset Mandiri. Dari duabelas kelompok *stakeholders* yang terlibat dalam pemanfaatan warisan budaya Situs Gunung Padang, terdapat 7 (tujuh) pihak di antaranya terjadi konflik atau benturan kepentingan.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta jajaran di bawahnya, dan wisatawan, penduduk Gunung Padang serta wartawan tidak konflik dengan siapapun. Posisi

mereka netral tidak berpihak pada kelompok manapun, karena memang kepentingan dan kebutuhan mereka tidak mengalami benturan kepentingan dengan para kelompok yang sedang bertikai. Berbeda dengan kasus di atas, pihak Forum Peduli Situs Gunung Padang konflik dengan Tim Terpadu Riset Mandiri, bahkan sempat terjadi kekerasan, adu fisik antara kedua belah pihak. Kasus 'kekerasan fisik' ini sampai harus diselesaikan di pengadilan⁵. Hasil pemetaan konflik, dapat diketahui bahwa pihak Tim Terpadu Riset Mandiri merupakan pihak yang mendominasi konflik pemanfaatan Situs Gunung Padang. Benturan kepentingan atau konflik tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Terlepas dari berbagai kemungkinan munculnya kepentingan eksternal (politis) di luar kepentingan arkeologi, konflik antara Ditjen Kebudayaan dengan Tim Terpadu Riset Mandiri berkaitan dengan kebijakan pelestarian⁶. Khusus konflik antar kedua lembaga ini, kami menamai sebagai konflik laten atau konflik tersembunyi, karena tidak terwacanakan di depan publik.

Berbeda dengan konflik antara Puslit Arkenas dengan Tim Terpadu Riset Mandiri merupakan konflik akademik terlihat cukup frontal berkaitan dengan perbedaan paradigma dalam memaknai Situs Gunung Padang⁷. Demikian pula

5 Dalam rangka uji Tomografi, Tim Terpadu Riset Mandiri harus membuat getaran atau ledakan di sekitar situs dengan mercon berdaya keras. Nampaknya suara ledakan itu cukup keras dan membuat terkejut warga sekitar. Adu mulut pun tidak terhindarkan lagi hingga terjadi pemukulan yang akhirnya sampai pada proses pengadilan.

6 Konflik laten atau konflik tersembunyi yang dimaksud disini merupakan konflik yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Konflik ini hanya dirasakan terbatas pada kalangan tertentu yang merasa tidak menyetujui atau merasa dirugikan. Dengan demikian, konflik tersembunyi ini merupakan konflik bathin yang juga di sebut konflik tertutup. Konflik laten Cagar Budaya Gunung Padang tidak dapat dilihat mata, tetapi dapat dirasakan khususnya oleh kalangan arkeologi yang sebenarnya tidak menyetujui pandangan Tim Terpadu Riset Mandiri. Walaupun demikian pada akhirnya mendukung juga kegiatan yang direncanakannya, bahkan dukungan dana. Tentu hal ini merupakan dilema tersendiri yang tidak bisa dihindari, karena struktur birokrasi kekuasaan atas yang tidak mungkin ditentang bawahan.

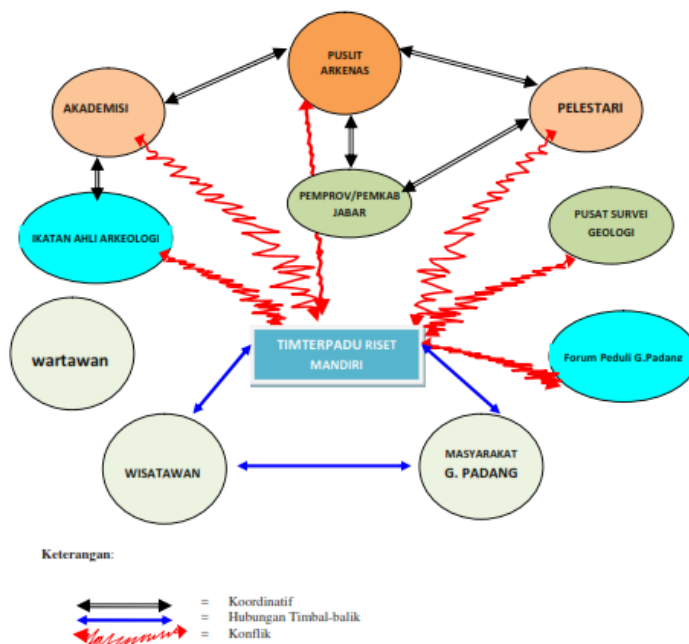
7 Konflik dalam arti perbedaan pandangan atau pendapat ini terlihat jelas ketika ketika debat ilmiah terjadi dan mereka saling mempertahankan pendapatnya yang berbeda pada seminar yang diselenggarakan oleh Puslit Arkenas pada 29 Maret 2012. Lebih jauh lihat Laporan Seminar Arkeologi Sehari "Rembuk

konflik antara (pihak akademisi, Ikatan Ahli Arkeologi serta pihak Pusat Survei Geologi) dengan Tim Terpadu Riset Mandiri berlatar belakang perbedaan dalam memaknai Situs Gunung Padang. Menurut pandangan Puslit Arkenas dan para arkeolog pada umumnya, Situs Gunung Padang merupakan tinggalan budaya megalitik yang dibangun pada pada sekitar 2.500 – 1.500 SM. Seperti banyak ditemukan di berbagai tempat di wilayah Indonesia, fungsi Punden berundak ini sebagai tempat pemujaan roh leluhur (Sukendar 2001: 55).

Berbeda dengan pandangan di atas, menurut Tim Terpadu Riset Mandiri, Gunung Padang merupakan bangunan yang berusia jauh lebih tua dari Piramida Mesir. Hasil uji karbon yang mereka lakukan, menunjukkan 5.200 SM atau 7.200 tahun yang lalu. Artinya Gunung Padang merupakan *multikomponen site*, yaitu pernah dibangun manusia sebelumnya, karena suatu sebab tertentu ditinggalkan, lalu jauh pada masa berikutnya dibangun kembali. Bahkan luas Piramida ini diperkirakan sepuluh kali lebih besar dari Candi Borobudur (Akbar 2013: 160). Lebih jauh, Danny Hilman mewakili Tim Terpadu Riset Mandiri menjelaskan, hasil survei dan pengeboran mengindikasikan masih adanya struktur bangunan di bawah Situs Gunung Padang.

“Situs Gunung Padang saya perkirakan berada pada periode 13.000-an. Oleh karena itu, saya menyarankan, pentingnya melakukan kalibrasi uji bor pada struktur bangunan yang diduga sebagai ruangan bawah tanah sekarang,” Demikian penjelasan Danny Hilman dihadapan ratusan peserta Seminar Gunung Padang.

Nasional Situs Gunung padang”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Arkeologi Nasional, Jakarta 29 Maret 2012.



Gambar 2. Pemetaan Konflik Situs Gunung Padang.

Pemetaan konflik Situs Gunung Padang secara lebih detil dapat digambarkan dalam bagan di atas⁸ (Gambar 2). Berbeda dengan pandangan di atas, dalam seminar Gunung Padang yang diselenggarakan oleh Puslit Arkenas pada 28 Maret 2012, Truman Simanjuntak menegaskan, leluhur kita tidak mengenal bangunan Piramida, melainkan sangat akrab dengan bangunan punden berundak yang tumbuh subur di Nusantara sebagai bagian dari kebudayaan megalitik.

“Data arkeologi regional tidak mengenal adanya ruang di bawah bangunan megalitik. Arkeologi Indonesia tidak memiliki indikasi, data, apalagi fakta yang menunjukkan keberadaan piramida dan Atlantis di Nusantara. Kita ingin Atlantis dan Piramida itu ada, namun kita tidak ingin mengada-ada, karena memang tidak ada” (Simanjuntak 2012).

⁸ Bagan pemetaan konflik ini mungkin masih kurang tepat, khususnya ketika memosisikan kategorisasi *stakeholders*. Tim Riset Terpadu Mandiri, disadari memang tidak bisa secara tegas dipertentangkan dengan komunitas akademik, karena fakta memperlihatkan salah satu anggotanya ada yang berasal dari perguruan tinggi, bahkan menjadi staf pengajar arkeologi. Persoalan bertambah rumit lagi, ketika diketahui staf pengajar arkeologi tersebut masih tercatat aktif sebagai anggota Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Permasalahannya adalah, dari aspek individual, apakah tidak bisa Tim Riset Terpadu Mandiri tetap dipertentangkan dengan IAAI, sekaligus dengan kelompok akademisi kalau memang fakta pelaku individunya demikian menjadi problematik tersendiri.

Pandangan tidak jauh berbeda dikemukakan pakar geolog Sutikno Bronto dari Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, bahwa Gunung Padang adalah leher/sumbat lava yang berstruktur kekar kolom yang roboh berserakan, kemudian ditata kembali oleh masyarakat masa lalu berfungsi sebagai punden berundak tempat upacara keagamaan (Bronto 2012). Mengomentari pandangan Oppenheimer, Daud Aris Tanudirdjo, mengatakan pandangan Oppenheimer itu sudah lama ditinggalkan, karena sekarang sudah banyak teori dan terbitan baru yang lebih terpercaya. Sejauh ini tidak ada informasi tentang pertanian pada 10.000 tahun yang lalu (tyl). Karena data tertua pertanian di Asia Tenggara ditemukan di Papua, sedangkan tanaman padi sudah didomestifikasi pertamakali ditemukan di Serawak pada 4.000 tyl. “Permainan-permainan semacam itu, biasa dilukiskan dalam buku-buku Imiah populer. “Kita harus berbicara dalam konteks akademik, jangan konteks politis,” kata pakar dari Universitas Gadjah Mada itu.

Menanggapi debat panjang para pakar tentang Gunung Padang, Yunus Satrio Atmojo mengingatkan, bahwa interpretasi antara arkeolog dan geolog jelas berbeda. Geolog menggunakan skala panjang ribuan bahkan jutaan tahun, sedangkan arkeolog menggunakan skala pendek ratusan tahun. “Kedua pendekatan itu sebenarnya dapat ditarik benang merah persamaan pandangan dengan cara melakukan pembuktian penelitian secara bersama-sama”. Demikian pandangan Ketua Ikatan Ahli Arkeologi dalam seminar itu. Hibauan Ketua IAAI itu hingga sekarang belum terwujud⁹.

Dapat dipastikan, debat panjang tidak akan berkesudahan, jika Seminar Gunung Padang

tidak dibatasi waktu. Mengutip pandangan para ahli, bahwa konflik seringkali merupakan bagian dari solusi atas suatu permasalahan yang sukar terpecahkan. Artinya, jika konflik tersebut dikelola secara benar, maka bukan tidak mungkin akan dapat mendorong ke arah perubahan yang diperlukan (Kiesberg 1992: 4; Fisher 2000: 6). Bahkan konflik fungsional seringkali menjadi prasyarat yang diperlukan untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik (Thung 2005: 82). Melihat hasil pemetaan konflik warisan budaya Gunung Padang, belum dapat diprediksi apakah konflik ini merupakan konflik fungsional atau justru sebaliknya disfungsional. Dalam kondisi sekarang ini, tidak seorang pun berani menebak, apakah konflik Gunung Padang masih akan berlanjut hingga tuntas atau berhenti sampai di sini. Hanya yang jelas, konflik Gunung Padang terjadi karena perbedaan persepsi dalam memaknai warisan budaya yang masing-masing pihak merasa paling benar pendapatnya. Dalam ranah ilmu pengetahuan, perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa.



Foto 2. Menjelang kunjungan Presiden SBY berpidato di Situs Gunung Padang.

Apa lagi jika mengingat sejarah perkembangan arkeologi, bahwa Ilmu ini memang sudah lama menjadi ajang pergulatan pemikiran para para ahli sejak dulu. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kajian pokok arkeologi bersifat *post-facto* dan fenomenal yang terjadi tidak sekarang, tetapi sudah

⁹ Dalam skala Nasional, himbauan pentingnya Situs Gunung Padang secepatnya harus dilakukan penelitian terpadu dari berbagai disiplin ilmu, ditegaskan oleh Presiden ketika berkunjung di situs ternama ini pada 27 Februari 2014. “... Saya meminta kepada menteri terkait, Gubernur Jawa Barat, Bupati Cianjur, kemudian jajaran kepolisian dan TNI serta kepada semua tim peneliti, untuk duduk bersama. Kita tetapkan rencana aksi yang definitif dan akan kita tuangkan nanti dalam satu kebijakan Nasional yang kita jalankan bersama”.

lama (Gibbon 1984) puluhan atau ribuan bahkan jutaan tahun silam. Dengan demikian data arkeologi sangat tidak lengkap, karena terpenggal zaman. Sifat fragmentaris data inilah menyebabkan kelonggaran para peneliti mengembangkan berbagai sudut pandang sesuai dengan latar belakang keilmuan masing-masing.

Aliran pasca-modernisme yang berhasil meruntuhkan aliran modernisme misalnya, beranggapan, bahwa realitas dan pengetahuan itu sebenarnya bersifat relatif dan subyektif karena, telah dipengaruhi berbagai kepentingan sosial (Hodder 1991; Thomas 1989; Renfrew dan Bahn 1991; Yoffee dan Seratt 1993). Bahkan menurut Hodder, pengetahuan yang benar atau realita masa lampau sebenarnya itu tidak ada, melainkan yang ada hanyalah pengetahuan masa lampau versi masyarakat masa kini. Walaupun para ilmuwan untuk memperoleh realita telah menempuh dengan berbagai cara yang saintifik, namun jika hasilnya bias, tentu ada beberapa faktor penyebabnya. Faktor penyebab itu bisa karena karena metodologinya yang tidak tepat atau karena teori, maupun latar belakang penelitiannya atau mungkin ada pamrih di baliknya, untuk kepentingan apa penelitian dilakukan (Hodder 1991; Tiley 1993; Shank 1992). Dalam konteks demikian itulah, jika prosedur keilmiah telah ditempuh, Situs Gunung Padang sejatinya bebas nilai, siapa saja boleh meneliti lalu menafsirkan. Soal salah atau benar hanyalah waktu yang akan membuktikan.

4. Penutup

Dalam sejarah pengelolaan warisan budaya di Indonesia, konflik warisan budaya jarang sekali mendapat perhatian secara serius, baik dari aspek akademis maupun praktis. Konflik selama ini cenderung lebih dipandang sebagai suatu fenomena buruk dan merugikan, oleh karena itu harus dihindari. Cara pandang yang demikian ini justru mengakibatkan konflik semakin berkembang dan bertambah rumit, karena konflik sebenarnya merupakan peristiwa

yang wajar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konflik tidak dapat dihindari selama manusia masih berinteraksi dengan manusia lain. Fenomena konflik yang terjadi di berbagai situs arkeologi selama ini, menyadarkan kepada kita, bahwa warisan budaya memiliki posisi sejajar dengan sumber daya alam lain, karena banyak pihak berkepentingan terhadapnya.

Penelitian ini memperlihatkan, konflik warisan budaya Situs Gunung Padang merupakan isu baru yang muncul pada awal 2012 akibat perbedaan dalam memaknai warisan budaya. Bagi kalangan arkeologi, Gunung Padang adalah situs megalitik yang biasa disebut punden berundak, dibangun pada 2.500 – 1.500 SM, sebagai tempat pemujaan roh leluhur. Sementara bagi Tim Terpadu Riset Mandiri, situs ini adalah bangunan piramida diduga berada pada periode 13.000-an. Kedua pemaknaan yang berbeda tersebut, dalam wacana publik ramai diperbincangkan hingga debat sudah menjadi konsumsi publik saat itu. Keduanya merasa pendapatnya yang paling benar. Debat dalam ranah ilmu pengetahuan memang sudah biasa dan bahkan perlu dikembangkan, kalau kita ingin maju kedepan.

Konflik Situs Gunung Padang adalah konflik akademik dalam ranah kepentingan Ilmu Pengetahuan. Perbedaan pemaknaan, merupakan faktor kunci utama yang menyebabkan munculnya konflik yang berkepanjangan dan belum ditemukan solusinya hingga sekarang. Perbedaan pandangan, perbedaan sasaran dan tujuan, seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan jika semua yang terlibat dalam konflik memiliki kesadaran menjunjung tinggi kebenaran. Suatu konflik dikhawatirkan akan berubah menjadi kekerasan jika saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pandangan tidak ada atau tidak memadai. Sebaliknya, jika konflik dapat diselesaikan dengan benar, justru akan memberikan manfaat, yaitu salah satunya mendorong ke arah perubahan yang lebih baik.

Oleh karena itu, dialog dan debat konstruktif antar para ahli penting untuk terus dikembangkan, agar saluran atau wadah berdiskusi mereka tidak macet dan berjalan secara wajar.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Dr. Supratikno Raharjo yang telah memeriksa sekaligus memberikan masukan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, Sukri. 2004. "Kawasan Pariwisata dan Konflik Pertanahan", dalam Sukri Abdurachman (ed.) *Konflik Pertanahan di Era Reformasi: Hukum Negara, Hukum Adat dan Tuntutan Rakyat*. Jakarta: Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI.
- Akbar, Ali. 2013. *Situs Gunung Padang Misteri dan Arkeologi*. Jakarta: Change Publication.
- Bronto, Sutikno. 2012. "Gunung Padang Berdasarkan Pandangan Geologi Gunung Api". Makalah disampaikan pada *Rembuk Nasional Situs Gunung Padang*, Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 29 Maret 2012.
- Coser, Lewis A. 1994. *The Functions of Social Conflict*. New York: Academic Press, Inc.
- Cleere, Henry F. 1989. "Introduction: the Rationale of Archaeological Management", dalam Henry F. Cleere (ed.), *Archaeological heritage management in the modern world*: 5-10. London: Unwinn-Hyman.
- Fisher, Simon. 2002. *Working with Conflict: skill et strategis for Action*. London: zed Books Ltd, 7 Cynthia Street. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk bertindak: British Council, 2001.
- Hilman, Danny Natawijaya. 2011. "Aplikasi Metode Geologi dalam Riset Bencana Katastropis Purba". Makalah disampaikan pada *Rembuk Nasional Situs Gunung Padang*, Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 29 Maret 2012.
- Hodder, Ian. 1991a. "Post-modernism, post-structuralism, and post-processual archaeology" dalam Ian Hodder (ed) *The Meaning of Things*. London, Harper Collins.
- Hodder, Ian. 1991b. *Reading The Past*. Cambridge: University Press.
- Ju Lan Thung. 2005. "Program Manajemen dan Transformasi Konflik LIPI", dalam Anwar Dewi Fortuna (ed.), *Konflik Kekerasan Internal, Tinjauan Sejarah, Ekonomi, Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kiesberg, Louis. 1992. *Social Conflict*, Second Edition Englewood Clifft, N.Y:Prentice Hall, Inc.
- Kleden, Ignas. 1998. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Cet. 1. Jakarta: LP3ES.
- Kreitner, Robert, dan Angelo Kinicki. 1995. *Organizational Behavior*. Chicago: Irwin.
- Luthans, Fred. 1985. *Organizational Behavior*. New York: McGraw-HillBook Company.
- Lauer, H. Robert. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terjemahan Alimandan dari Judul asli *Perspectives on Social Change*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Nimpoeno, S. John. 1980, "Fungsi Warisan Sebagai Pembentuk Sikap Terhadap Pembangunan", dalam *Analisis Kebudayaan* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 26-31.
- Nugroho, Fera, Kana, L, Nico dan Prajarto Dirdjosanyoto. 2004. *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Macleod, D. G. 1977. "Peddle or perish: archaeological marketing from concept to product delivery", dalam Michael B. Schiffer dan George J. Gummerman (eds.), *Conservation Archaeology*. New York : Academic Press.

- Pruit, G. Dean, dan Rubin Z. Jeffrey. 2004. Teori Konflik sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan dari *Social Conflict, Escalation, Statemen, and Setlemen*. New York: McGraw-Hill, Inc 1986.
- Raven, B.H., dan Rubin, J.Z. 1983. *Social Psychology* 2nd. New York: Wiley.
- Renfrew, C. dan P. Bahn, 1991. *Archaeology: theories, methods and practice*. London: Thames and Hudson.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, and Applications*. USA: Prentice-Hall International Editions.
- Shank, Michael. 1992. *Eksperiencing the pas*. London: Routege.
- Tim Peneliti. 2012. "Penelitian Arkeologi Situs Gunung Padang, Kabupaten Cianjur", *Laporan Penelitian Arkeologi*. Pusat Arkeologi Nasional. (tidak terbit).
- Thomas, David Hurst. 1989. *Archaeology Worth, Hold, Rinchart and Winston*.
- Tilley, Christopher. 1993. Interpretation and Poelitics of the past, dalam Christopher Tilley, *Interpretative Archaeology*. Providence: Berg.
- Simanjuntak, Harry Truman. 2012. "Piramida Jawa Barat dan Peradaban Atlantis Sundaland Itu Tidak Ada." Makalah disampaikan pada *Rembuk Nasional Situs Gunung Padang*, Jakarta, Pusat Penelitian Arkeollogi Nasional, 29 Maret 2012.
- Stoner, A.F., James dan Freeman, R., Edward. 1989. *Management*. Prentice- Hall, New York, hal. 391-392.
- Sukendar, Haris. 2001. *Peninggalan Tradisi Megalitik di Daerah Cianjur, Jawa Barat*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Sulistyanto, Bambang. 2006. "The pattern of conflict of benefeting in Indonesia", di dalam: Truman Simanjuntak. dkk (ed.), *Archaeology; Indonesian Perspective; R.P. Soejono's festschrift: 577-594* Jakarta: LIPI Press.
- . 2008. Resolusi Konflik dalam Manajemen Warisan Budaya Situs Sangiran. *Disertasi* Universitas Indonesia. (tidak terbit).
- Tanudirjo, Daud Aris. 1997/1998. "Arkeologi Pasca-Modernisme untuk Direnungkan" dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII*, Jilid 2. Cipanas, 12 -16 Maret 1996. Jakarta: Proyek Penelitian Arkeologi.
- Yoffee, N dan Seratt. 1993. "Introduction the sources of archaeology theory", dalam Yoffee, N dan Seratt (eds.), *Archaeological theory who set the agenda?* Cambridge University Press.